



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 58**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan proses pembangunan setiap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemerintah Kabupaten Garut wajib menyediakan perencanaan pembangunan yang akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga pada prosesnya nanti dapat dilakukan evaluasi berkenaan dengan keluaran dan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Kab. Garut tahun 2019-2024 yang kemudian di implementasikan dalam Renstra Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2019-2024 Dinas Perhubungan termasuk kedalam misi 3 Kabupaten Garut yaitu *Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang* dengan sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Berdasarkan proses pembangunan yang telah berjalan, program pokok pokok Dinas Perhubungan masih melanjutkan program kerja sesuai Perubahan Renstra 2019-2024 yaitu mengatasi minimnya sektor sarana prasarana penunjang bidang perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan apabila diukur dari rasio kewenangan yang dimiliki seperti panjang jalan, luas wilayah pelayanan dan lain-lain. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam usaha terus konsisten untuk menentukan arah kebijakan yang mendukung untuk lima tahun kedepan dengan maksud adanya peningkatan yang signifikan berkaitan dengan keberadaan sarana prasarana perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan.

Sesuai dengan amanat presiden dalam sidang kabinet paripurna telah ditetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dengan kebijakan mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan untuk rencana kerja tahun 2023 berkenaan dengan kebijakan penyusunan anggaran difokuskan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, *Major Project*, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas). Kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) tersebut di *break down* oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang diimplementasikan dalam program pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah sebagai upaya percepatan pemulihan kondisi ekonomi pasca dampak covid 19.

Untuk menjaga keselarasan perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Daerah (RKPD 2023) dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Garut berupaya Upaya yang dilakukan Kondisi sebagaimana tersebut diatas terus diupayakan dapat teratasi oleh Dinas Perhubungan untuk memperkuat sarana dan prasarana perlengkapan jalan dalam rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk beberapa tahun kedepan.

Pada pelaksanaannya proses penyusunan Renja 2023 telah melewati berbagai tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun tahapan – tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;

5. Perumusan rancangan akhir dan
6. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2023 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan yang matang dan terukur demi tercapainya sasaran kinerja akhir sesuai RPJMD Perubahan 2019-2024 dan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan 2019-2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- 2) Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Tahun Lalu

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada Anggaran dan pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan perangkat daerah beserta kebutuhan anggaran/ pagu indikatif.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra 2019-2024

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Pada tahun anggaran 2021 telah diaplikasikan kedalam 3 (tiga) Program, 15 kegiatan dan 29 Sub kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Program Kegiatan Tahun 2021 adalah sebesar 92,97% dengan pagu sebesar Rp. 43.535.091.157,- dari Pagu sebesar 46.826.252.580,- dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk realisasi program kegiatan tahun 2021 sesuai dengan dengan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2021 yang telah ditetapkan maka uraiannya dapat dilihat pada penjelasan berikut dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 40.434.744.880 dengan realisasi Rp. 37.237.895.727 atau sebesar 92,09 %. Program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.500.000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.500.000 atau sebesar 100%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Dokumen Perencanaan dinas perhubungan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan hasil

yang dicapai adalah Tersedianya dokumen perencanaan;

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 16.802.627.754 dengan realisasi Rp. 14.985.922.161 atau sebesar 89,18%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.853.127.754 dengan realisasi Rp. 13.039.082.161 atau sebesar 87,78%, hal ini karena adanya PNS yang memasuki masa purnabakti. sasaran sub kegiatan Tersedianya Gaji PNS dengan Keluaran sub kegiatan adalah jumlah PNS Dinas Perhubungan dan hasil yang dicapai adalah Terbayarkannya gaji PNS;

1.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.949.500.000 dengan realisasi Rp. 1.946.840.000 atau 99,86%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya kinerja Pegawai Non PNS (TKK dan TKS) dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah pegawai Non PNS (TKK dan TKS) dan hasil yang dicapai adalah Terbayarkannya Honorarium ASN Non PNS;

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 509.199.700 dengan realisasi Rp. 483.693.840 atau sebesar 94,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.500.000 dengan realisasi Rp. 17.500.000 atau 100%. sasaran sub kegiatan adalah Terjaganya kondisi penerangan kantor dengan Keluaran sub

kegiatan adalah Jumlah komponen peralatan listrik dan hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya jaringan listrik kantor;

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 212.572.200 dengan realisasi Rp. 211.592.000 atau sebesar 99,53%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 53.371.000 dengan realisasi Rp. 53.371.000 atau sebesar 100%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya barang cetakan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah jenis barang cetakan dan hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan;

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 dengan realisasi Rp. 1.100.000 atau sebesar 15,71%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya pengetahuan ASN Dinas Perhubungan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah koran dan majalah dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya bahan bacaan;

1.3.5 Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 21.286.000 dengan realisasi Rp. 21.275.500 atau sebesar 99,95%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya makan minum pegawai dan tamu dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah makan minum pegawai dan tamu dan hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya makan minum pegawai dan tamu;

1.3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mendapatkan anggaran sebesar Rp. 197.470.500 dengan realisasi Rp. 178.855.340 atau sebesar 90,57%. sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi eksternal urusan dinas dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah perjalanan dinas dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya perjalanan Dinas dalam dan luar daerah;

1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 198.742.000 atau sebesar 99,37%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 198.742.000 atau sebesar 99,37%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya prasarana dan fasilitas perkantoran dengan Keluaran sub kegiatan adalah Luas interior ruangan kantor dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya ruangan kantor yang representatif;

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.529.725.426 dengan realisasi Rp. 21.188.156.055 atau sebesar 94,04%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mendapatkan anggaran sebesar Rp. 22.421.611.626 dengan realisasi Rp. 21.080.166.505 atau sebesar 94,01%. sasaran sub kegiatan adalah Terpenuhinya pembayaran rekening listrik dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah bulan pembayaran tagihan

listrik dan hasil yang dicapai adalah Terjaganya penerangan kantor;

1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 108.113.800 dengan realisasi Rp. 107.989.550 atau sebesar 99,88%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya kebersihan kantor dengan Keluaran sub kegiatan Jumlah peralatan kebersihan, hasil yang dicapai adalah Terjaganya kebersihan kantor;

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mendapatkan anggaran sebesar Rp. 375.692.000 dengan realisasi Rp. 363.881.671 atau sebesar 96,85%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 125.692.000 dengan realisasi Rp. 114.722.971 atau 91,27%, hal ini disebabkan adanya kendala teknis sehingga 2 kendaraan hibah belum bisa dibalik namakan. sasaran sub kegiatan Meningkatnya kondisi kend. dinas operasional, Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kend. dinas operasional, hasil yang dicapai adalah Tersedianya kend. dinas operasional yang laik pakai;

1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya mendapatkan anggaran sebesar Rp. 250.000.000 dengan realisasi Rp. 249.158.700 atau sebesar 99,66%. sasaran sub kegiatan Meningkatnya kondisi gedung kantor, Keluaran sub kegiatan Luas kantor UPTD yang direhabilitasi, hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya gedung kantor dinas dan UPTD wilayah;

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendapatkan anggaran sebesar Rp.

6.241.507.700 dengan realisasi Rp. 6.152.749.430 atau sebesar 98,57%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.720.900 atau sebesar 99,72%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.720.900 atau sebesar 99,72%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatkan Lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir umum dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir umum dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya pengawasan dan pengendalian parkir umum;

2.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 670.902.700 dengan realisasi Rp. 664.147.800 atau sebesar 98,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.300.000 dengan realisasi Rp. 197.099.900 atau sebesar 98,40%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya Integrasi aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan, alat uji, upgrade Sistem Informasi pelayanan jasa perhubungan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Integrasi aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan dan hasil yang dicapai

adalah Terintegrasinya aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan;

2.2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 270.602.700 dengan realisasi Rp. 267.048.000 atau sebesar 98,68%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya Kelengkapan Uji (Buku/Kartu Uji dan Stiker Uji) dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kelengkapan uji (Buku/Kartu uji dan stiker uji) dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya proses pengujian kendaraan bermotor;

2.2.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mendapatkan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dengan realisasi Rp. 199.999.900 atau sebesar 99,99%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya unjuk kerja alat pengujian kendaraan bermotor dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara dan hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor;

2.3 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000 dengan realisasi Rp. 2.983.505.050 atau sebesar 99,45%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.537.100.000 dengan realisasi Rp. 1.530.980.300 atau sebesar 99,60%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya PJU yang terbangun dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah PJU yang terbangun dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya pembangunan PJU;

2.3.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.462.900.000 dengan realisasi Rp. 1.452.524.750 atau sebesar 99,29%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya efisiensi dan efektivitas PJU dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang, dan hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU);

2.4 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.870.605.000 dengan realisasi Rp. 1.835.631.680 atau sebesar 98,13%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.4.1 Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.066.000.000 dengan realisasi Rp. 1.053.787.000 atau sebesar 98,85%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan pengamanan angkutan hari raya, natal dan tahun baru dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan hasil yang dicapai adalah Terkendalinya operasional angkutan umum dan pengamanan angkutan hari raya;

2.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mendapatkan anggaran sebesar Rp. 754.605.000 dengan realisasi Rp. 732.546.180 atau sebesar 97,07%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL)

yang terpasang, Rambu Lalin yang terpasang dan marka yang terpasang dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah rambu - rambu lalu lintas yang terpasang dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya Rambu lalu lintas, CCTV, Rambu Papan nama jalan dan Marka Jalan;

2.4.3 Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.298.500 atau sebesar 98,59%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lalu lintas dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya sarana prasarana penunjang lalu lintas;

2.5 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 290.000.000 dengan realisasi Rp. 264.106.100 atau sebesar 91,07%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.5.1 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 290.000.000 dengan realisasi Rp. 264.106.100 atau sebesar 91,07%, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam melaksanakan temu wicara dengan pengelola angkutan karena adanya *social distancing* (dampak covid 19). sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Dokumen data base angkutan barang, peserta Temu wicara pengelola angkutan umum, Shelter/ halte angkutan umum dan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan

umum dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen data base angkutan barang dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen data base angkutan barang;

2.6 Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 19.999.800 atau sebesar 99,99%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.6.1 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan realisasi Rp. 19.999.800 atau sebesar 99,99%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya kendaraan tidak bermotor yang terkendali dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan tidak bermotor yang terkendali dan hasil yang dicapai adalah Terkendalnya kendaraan tidak bermotor yang beroperasi pada hari raya;

2.7 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dengan realisasi Rp. 136.225.000 atau sebesar 97,30%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.7.1 Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dengan realisasi Rp. 136.225.000 atau sebesar 97,30%. sasaran sub kegiatan adalah Tersedianya Dokumen data base angkutan umum dan Dokumen Evaluasi Jaringan angkutan umum

dalam trayek dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen data base angkutan umum dan hasil yang dicapai adalah Tersedianya dokumen data base angkutan umum dan dokumen evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek;

2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 149.413.100 atau sebesar 99,60%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

2.8.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ mendapatkan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dengan realisasi Rp. 49.759.300 atau sebesar 99,51%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan dan hasil yang dicapai adalah Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan;

2.8.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi Rp. 99.653.800 atau sebesar 99,65%. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Frekuensi SMK ke Pengusaha Angkutan dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah frekuensi SMK ke pengusaha angkutan;

3. Program Pengelolaan Pelayaran mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 144.446.000 atau sebesar 96,29%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

3.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan

Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 144.446.000 atau sebesar 96,29%. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

3.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 dengan realisasi Rp. 144.446.000 atau sebesar 96,29%, hal ini disebabkan adanya keterbatasan mobilitas yang diakibatkan oleh dampak pandemi covid 19. sasaran sub kegiatan adalah Meningkatnya Kapal layar <7GT yang layak operasi, lokasi Operasional Kapal <7GT dan peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP dengan Keluaran sub kegiatan adalah Jumlah kapal layar <7GT yang layak operasi dan hasil yang dicapai adalah Terawasnya kapal layar <7GT dan tersedianya peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP;

Realisasi program kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekafitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2.09. | Wajib | | | | | | | | | |
| 5.1.2.09.01. | Perhubungan | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Persentase peningkatan Pelayanan Angkutan umum Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas Persentase Sosialisasi keselamatan perhubungan | 48.227.200.000 | 3.738.351.300 | 6.241.507.700 | 6.152.749.430 | 99,09 | 3.758.443.194 | 13.649.543.924 | 28,30 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.02.04. | Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02.04.02. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir umum | 500.000.000 | 47.400.000 | 100.000.000 | 99.720.900 | 99,72 | 50.000.000 | 197.120.900 | 39,42 |
| 2.15.2.15.01.02.05. | Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02.05.07. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang di pelihara | 800.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 199.999.900 | 100,00 | 200.000.000 | 499.999.900 | 62,50 |
| 2.15.2.15.01.02.05.04. | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Kelengkapan Uji (Buku/Kartu Uji dan Stiker Uji) | 1.500.000.000 | 348.905.000 | 270.602.700 | 267.048.000 | 98,69 | 199.477.400 | 815.430.400 | 54,36 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.02.05.01. | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Integrasi aplikasi pengujian ke Website Dinas Perhubungan, Jumlah alat uji, Upgrade sistem informasi pelayanan jasa perhubungan | 700.300.000 | 50.000.000 | 200.300.000 | 197.099.900 | 98,40 | - | 247.099.900 | 35,28 |
| 2.15.2.15.01.02.02. | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02.02.04. | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang, Jumlah PJU yang terpelihara | 12.850.000.000 | 568.020.000 | 1.462.900.000 | 1.452.524.750 | 99,29 | 1.333.887.000 | 3.354.431.750 | 26,10 |
| 2.15.2.15.01.02.02.02. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah PJU yang terbangun | 19.500.000.000 | 496.580.000 | 1.537.100.000 | 1.530.980.300 | 99,60 | 566.900.000 | 2.594.460.300 | 13,30 |
| 2.15.2.15.01.02.10. | Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|--|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.02.10.02. | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kendaraan tidak bermotor yang terkendali | 510.000.000 | 50.240.000 | 20.000.000 | 19.999.800 | 100,00 | 63.709.000 | 133.948.800 | 26,26 |
| 2.15.2.15.01.02.12. | Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02.12.01. | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota | Jumlah dokumen evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek | 650.000.000 | 295.470.000 | 140.000.000 | 136.225.000 | 97,30 | - | 431.695.000 | 66,41 |
| 2.15.2.15.01.02.09. | Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.02.09.02. | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen data base angkutan barang, Jumlah Shelter/halte angkutan umum, Jumlah peserta temu wicara, Jumlah sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum | 1.311.000.000 | 77.900.000 | 290.000.000 | 264.106.100 | 91,07 | 50.128.000 | 392.134.100 | 29,91 |
| 2.15.2.15.01.02.06. | Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02.06.01. | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, Jumlah wilayah pengamanan angkutan hari raya, natal dan tahun baru. | 3.986.000.000 | 650.985.000 | 1.066.000.000 | 1.053.787.000 | 98,85 | 918.115.980 | 2.622.887.980 | 65,80 |
| 2.15.2.15.01.02.06.02. | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah rambu - rambu lalu lintas, Panjang marka yang terpasang, Jumlah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpasang | 3.923.900.000 | 772.941.300 | 754.605.000 | 732.546.180 | 97,08 | 304.440.000 | 1.809.927.480 | 46,13 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.02.06.03. | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas | 926.000.000 | 279.910.000 | 50.000.000 | 49.298.500 | 98,60 | - | 329.208.500 | 35,55 |
| 2.15.2.15.01.02.08. | Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.02.08.01. | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan | 670.000.000 | | 50.000.000 | 49.759.300 | 99,52 | 50.000.000 | 99.759.300 | 14,89 |
| 2.15.2.15.01.02.08.04. | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah frekuensi SMK ke pengusaha angkutan | 400.000.000 | | 100.000.000 | 99.653.800 | 99,65 | 21.785.814 | 121.439.614 | 30,36 |
| 2.15.2.15.01.03. | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase sarana pelayaran yang laik layar | 600.000.000 | 54.885.000 | 150.000.000 | 144.446.000 | 96,30 | 59.825.640 | 259.156.640 | 43,19 |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.03.02. | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.03.02.02. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah kapal layar <7GT yang layak operasi, Jumlah lokasi operasional kapal <7GT, Jumlah peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP | 600.000.000 | 54.885.000 | 150.000.000 | 144.446.000 | 96,30 | 59.825.640 | 259.156.640 | 43,19 |
| 2.15.2.15.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi | 219.635.180.500 | 23.824.194.368 | 40.434.744.880 | 37.237.895.727 | 92,09 | 40.636.870.479 | 101.698.960.574 | 46,30 |
| 2.15.2.15.01.01.01. | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.01.01.01. | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan | 92.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00 | 174.998.800 | 209.998.800 | 227,03 |
| 2.15.2.15.01.01.02. | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 2.15.2.15.01.01.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana yang di butuhkan jumlah PNS Dinas Perhubungan | 59.760.000.000 | 1.155.245.000 | 14.853.127.754 | 13.039.082.161 | 87,79 | 15.038.395.629 | 29.232.722.790 | 48,92 |
| 2.15.2.15.01.01.02.02. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pegawai Non PNS (TKK dan TKS) | 10.735.600.000 | 1.949.500.000 | 1.949.500.000 | 1.946.840.000 | 99,86 | 1.934.990.000 | 5.831.330.000 | 54,32 |
| 2.15.2.15.01.01.06. | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.01.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen peralatan listrik | 90.000.000 | 25.000.000 | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00 | 20.000.000 | 62.500.000 | 69,44 |
| 2.15.2.15.01.01.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis ATK, peralatan dan perlengkapan kantor | 1.183.572.200 | 75.256.000 | 212.572.200 | 211.592.000 | 99,54 | 50.715.800 | 337.563.800 | 28,52 |
| 2.15.2.15.01.01.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan | 458.371.000 | 100.584.400 | 53.371.000 | 53.371.000 | 100,00 | 115.915.500 | 269.870.900 | 58,88 |
| 2.15.2.15.01.01.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah koran dan majalah | 37.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | 1.100.000 | 15,71 | 10.000.000 | 21.100.000 | 57,03 |
| 2.15.2.15.01.01.06.08. | Fasilitasi kunjungan tamu | Jumlah makan minum pegawai dan tamu | 206.286.000 | 23.824.200 | 21.286.000 | 21.275.500 | 99,95 | 70.000.000 | 115.099.700 | 55,80 |
| 2.15.2.15.01.01.06.09. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas luar daerah | 927.470.500 | 165.279.000 | 197.470.500 | 178.855.340 | 90,57 | 137.641.000 | 481.775.340 | 51,95 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) | Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2020 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2021 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Luas Interior ruangan kantor | 120.000.000 | | 200.000.000 | 198.742.000 | 99,37 | - | 198.742.000 | 165,62 |
| 2.15.2.15.01.01.08. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.01.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan pembayaran tagihan listrik | 95.400.000.000 | 20.171.005.768 | 22.421.611.626 | 21.080.166.505 | 94,02 | 23.000.000.000 | 64.251.172.273 | 67,35 |
| 2.15.2.15.01.01.08.04. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah peralatan kebersihan | 49.233.688.800 | 50.000.000 | 108.113.800 | 107.989.550 | 99,89 | 16.283.000 | 174.272.550 | 0,35 |
| 2.15.2.15.01.01.09. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | |
| 2.15.2.15.01.01.09.02. | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional | 540.692.000 | 81.000.000 | 125.692.000 | 114.722.971 | 91,27 | 67.930.750 | 263.653.721 | 48,76 |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya | Luas ruangan kantor dinas yang dipelihara | 850.000.000 | | 250.000.000 | 249.158.700 | 99,66 | - | 249.158.700 | 29,31 |

Dari uraian realisasi program kegiatan tersebut diatas apabila di ukur dari realisasi kinerja, seluruh program kegiatan mencapai target sesuai yang diharapkan. Hanya ada satu sub kegiatan yang tidak diserap yaitu : Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disebabkan pada tahun 2021 akibat dampak covid 19 bahan bacaan diperoleh secara *online* karena adanya keterbatasan interaksi antara penyedia majalah/ koran dengan aparaturnya Dinas Perhubungan.

Adapun faktor – faktor terpenuhinya target kinerja adalah :

1. Melakukan efisiensi kegiatan untuk efektivitas terhadap pegawai serta memaksimalkan segala kemampuan sumber daya yang ada;
2. Menganggarkan kembali dana untuk pengadaan sarana prasarana perhubungan yang dirasa belum optimal pada anggaran Perubahan tahun berjalan;
3. Melakukan evaluasi secara berkala dan intensif guna mendorong percepatan pelaksanaan program kegiatan;
4. Mendorong semua unsur pegawai Dinas Perhubungan untuk terlibat secara menyeluruh sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuannya masing-masing;

Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra dengan tercapainya target kinerja program kegiatan tahun anggaran 2021 adalah :

1. Capaian target Renstra meningkat secara signifikan;
2. Memudahkan proses evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. Lebih mudah dalam menerapkan skala prioritas terhadap program kegiatan agar pembangunan dari sektor perhubungan lebih merata.

Atas dasar uraian diatas, maka Dinas Perhubungan mengambil kebijakan/ tindakan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya adalah :

1. Menjaga konsistensi capaian target kinerja tahun sebelumnya agar lebih meningkat pada tahun berikutnya;
2. Melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas dengan menggunakan skala prioritas seperti rambu, marka, pengaman jalan dan RPPJ, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas;
3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya peningkatan retribusi dari sektor perhubungan seperti dalam pengelolaan parkir;
4. Mengupayakan peningkatan belanja pada sektor pemeliharaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang telah tersedia agar tetap terjaga kondisinya;
5. Meningkatkan pelayanan dalam hal perijinan dengan cara penyederhanaan birokrasi dan transparansi;
6. Penegakan Peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan serta sanksi bagi yang merusak fasilitas lalu lintas;
7. Melaksanakan upaya penegakkan hukum terhadap pemakai jalan baik dalam bentuk preventif maupun represif;
8. Memprioritaskan pengadaan perlengkapan dan sarana pelayanan publik;
9. Melayani keluhan masyarakat melalui media sosial terutama yang berkaitan dengan PJU dan perlengkapan jalan lainnya;
10. Terus menerus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021

Analisis kinerja pelayanan tahun 2021 meliputi Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2021 yang merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 serta implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Adapun hasil analisis yang diperoleh tergambar dalam uraian sebagaimana berikut dibawah ini :

2.2.1 Capaian kinerja RPJMD

Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2021 merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Garut. Adapun hasil yang dapat dicapai sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kabupaten Garut Tahun 2021

| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------|-----------|-----------|------------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 2.09. PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | | % | 0,3909 | 144.284 | 158.712 | 174.584 | 0,4368 | | 158.712 | 174.584 | |
| 2 | Rasio Ijin Trayek | | % | 0,061 | 0,083 | 0,084 | 0,085 | 0,061 | | 0,084 | 0,085 | |
| 3 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | | Unit | 13307 | 13.706 | 14.117 | 14.541 | 8.662 | | 14.117 | 14.541 | |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | Lokasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 | Persentase Layanan Angkutan Darat | | % | 0,3909 | 0,0809 | 0,0847 | 0,0888 | 0,4368 | | 0,0847 | 0,0888 | |
| 6 | Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum | | % | 9,06 | 7,91 | 6,92 | 6,04 | 18,07 | | 6,92 | 6,04 | |
| 7 | Pemasangan Rambu-Rambu | | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 158 | 156 | 89 | 90 | |
| 8 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan | | kend /Km | 0.062 | 0,060 | 0,059 | 0,057 | 0,062 | | 0,059 | 0,057 | |
| 9 | Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum | | Org | 6.384.856 | 1.783.860 | 1.873.053 | 1.966.706 | 501.224 | | 1.873.053 | 1.966.706 | |
| 10 | Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandar/Terminal Per Tahun | | Org/Thn | 6.384.856 | 1.783.860 | 1.873.053 | 1.966.706 | 501.224 | | 1.873.053 | 1.966.706 | |

Dari tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 indikator IKK yang diukur 8 indikator mencapai target dan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, sementara 4

indikator IKK lainnya tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian atau realisasi IKK pada tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2021 mengalami Kenaikan. Adapun untuk Indikator yang tidak mencapai target disebabkan karena :

1. Disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian dan hal ini berimbas terhadap sektor transportasi (menurunnya pengguna jasa angkutan umum);
2. Adanya efisiensi anggaran terhadap pembangunan fisik/ bangunan dalam hal ini pembangunan terminal type C;
3. Terjadinya kerusakan prasarana alat uji kendaraan bermotor yang menyebabkan terhentinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di unit pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Garut dalam kurun waktu yang cukup lama (3 bulan);
4. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Garut untuk mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terhenti. Adapun langkah – langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mengeluarkan surat rekomendasi pengujian kendaraan bermotor wajib uji di luar wilayah Kabupaten Garut agar masyarakat pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor tetap bisa melakukan uji kendaraannya;
2. Menginventarisir kembali sarana prasarana yang tidak bisa di sediakan pada tahun anggaran 2020 agar bisa kembali di ajukan pada tahun anggaran selanjutnya;
3. Mengoptimalkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK Dinas Perhubungan agar pada pelaksanaan tahun selanjutnya realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.1.1 Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra Dinas

Perhubungan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2021 diperoleh data – data sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.3
Kinerja Pencapaian Renstra 2019-2024

| NO | INDIKATOR KINERJA | HASIL TAHUN 2020 | HASIL TAHUN 2021 | TARGET TAHUN 2021 | TINGKAT CAPAIAN 2020 THD TARGET (%) | TERCAPAI / TIDAK **) | HASIL SAMPAI DENGAN 2021 | TARGET AKHIR RENSTRA |
|----|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 1 | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (%) | 29,59 | 68,29 % | 68,29% | 100% | √ | 68,29% | 97,22% |
| 2 | Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%) | 32,50 | 62,05 % | 62,05% | 100% | √ | 62,05% | 99,12% |
| 3 | Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi (%) | 27,92 | 50,06 % | 50,06% | 100% | √ | 50,06% | 97,92% |
| 4 | Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan (%) | 49,32 | 52,09 % | 52,09% | 100% | √ | 52,09% | 100% |
| 4. | Tingkat Laik Layar Sarana Pelayaran | n/a | 83,33 % | 83,33% | | | 83,33% | 100% |

Ket : √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

3.1.1.1 Rincian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun anggaran 2021 yang diukur berdasarkan perubahan perjanjian kinerja Kepala Dinas

Perhubungan Tahun 2021 meliputi 2 (dua) sasaran dan 4 (Empat) indikator. Dari 4 (Empat) indikator tersebut semuanya mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berikut uraian rincian kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2021, sebagai berikut :

1) **Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan.**

Sasaran Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan memiliki 2 (dua) indikator dengan deskripsi penjelasan capaian sebagai berikut :

1. Capaian indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan adalah 68,29% dari target sebesar 68,29% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *adanya pengalihan anggaran terhadap program kegiatan prioritas mengingat adanya efisiensi anggaran berkenaan dengan penanganan pandemi Covid 19. Tidak lupa pula melakukan pengawasan yang cukup ketat kepada kuasa pengguna anggaran agar dalam pelaksanaan program kegiatan lebih memprioritaskan kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana perhubungan, sehingga arah kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.*
2. Indikator Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan capaian kinerja sebesar 62,05% dari target 62,05% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *Penyediaan perlengkapan jalan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan prioritas pemerintah Kabupaten Garut yang kewenangannya ada di Dinas Perhubungan, sehingga dalam proses pengadaan benar – benar diawasi mulai dari tahap penganggaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu berkenaan dengan pengadaan rambu – rambu lalu lintas ada prioritas terutama pada pengadaan rambu papan nama jalan untuk jalan baru yang ada di Kabupaten Garut.*

2) **Meningkatnya Pelayanan Angkutan dan Sosialisasi/ Penyuluhan Keselamatan Perhubungan**

1. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi

berhasil mencapai target sebesar 50,06% dari target 50,06% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *ketersediaan angkutan umum tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga upaya dinas perhubungan dalam meningkatkan ketersediaan angkutan umum yang beroperasi tidak mengalami kendala yang cukup berarti.*

2. Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan target 52,09% dengan realisasi 52,09% atau persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *adanya kebijakan dan inisiatif dari jajaran pimpinan dinas Perhubungan untuk mengalihkan kegiatan yang sedianya berfokus terhadap pengumpulan masa menjadi kegiatan yang bersifat penyediaan barang yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, sehingga secara tidak langsung tidak mengurangi substansi program keselamatan perhubungan. Selain itu ada kebijakan sosialisasi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom.*
3. Tingkat laik layar sarana pelayaran memiliki target sebesar 83,33% dengan realisasi sebesar 83,33% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *untuk sarana pelayaran sudah tersedia data yang akurat mengenai jumlah serta lokasi yang cukup akurat sehingga memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan.*

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sementara itu isu strategis Dinas Perhubungan berkenaan dengan penyusunan program kegiatan tahun 2023 adalah :

- a. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem angkutan umum yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan IPTEK dalam penyelenggaraan Transportasi;

- d. Masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan keselamatan lalu lintas.

Apabila dikaitkan dengan Visi Misi kepala Daerah, Dinas Perhubungan masuk ke dalam misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan tujuan Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar secara merata yang mampu mendorong percepatan ekonomi, sosial dan budaya. Indikator tujuannya adalah Indeks daya saing infrastruktur (%). Salah satu faktor penunjang daya saing infrastruktur ada di Dinas Perhubungan berupa penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan. Artinya ada keselarasan antara misi kepala daerah dengan program kerja Dinas Perhubungan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa bila program kerja Dinas Perhubungan tidak terealisasi maka secara langsung akan menghambat atau berpengaruh terhadap pencapaian misi Kepala Daerah.

Kaitan dengan catatan strategis Kinerja Dinas Perhubungan yang terkait dengan ruang publik, seperti Penertiban Terminal tidak untuk pasar dan munculnya pungutan liar, di sisi lain penertiban ini akan berdampak pada PAD telah ditindak lanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan antara lain :

- a. Pasar merupakan salah satu tarikan perjalanan yang cukup besar bagi operator angkutan umum sehingga lokasi terminal di beberapa kota termasuk di Kabupaten Garut berdampingan dengan Pasar. Namun dengan bertambahnya pedagang menjadikan kapasitas pasar tidak dapat menampung penambahan jumlah pedagang tersebut, sehingga pedagang merambah ke lahan terminal yang berada disekitarnya. Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan pembangunan Terminal dengan mengedepankan fungsi terminal sebagai pelayanan terhadap moda angkutan dan memisahkan kegiatan terminal dengan aktivitas perekonomian. Namun dengan keterbatasan anggaran, pembangunan belum dapat terealisasi karena lahan yang ada sudah tidak mampu menampung perkembangan saat ini.

- b. Berkenaan dengan penertiban pungutan, Dinas Perhubungan telah melakukan pemungutan retribusi terminal telah dilakukan pemungutan sesuai dengan peruntukan dan tempat pemungutan, dimana pungutan retribusi terminal hanya dipungut di dalam areal terminal sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Potensi pendapatan yang ada saat ini belum optimal dikarenakan keterbatasan terminal sehingga pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan di beberapa lokasi terminal yang dilayani trayek angkutan umum. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin meskipun terdapat kendala sulitnya sirkulasi kendaraan yang akan masuk atau keluar terminal karena keberadaan pedagang yang sudah merambah akses masuk/keluar di sekitar terminal.
- d. Namun demikian Dinas Perhubungan tetap berupaya melakukan langkah-langkah koordinasi dan penempatan petugas dalam memberikan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sekitar lokasi pasar dan mengarahkan angkutan umum untuk memasuki terminal.
- e. Untuk Tahun Anggaran 2023 berkenaan dengan pungutan retribusi PAD agar terorganisir dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada akan dilakukan inovasi dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta dalam penataan potensi parkir di wilayah Kabupaten Garut.

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, catatan strategis dan permasalahan di lapangan maka diperoleh rumusan untuk rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah dengan memprioritaskan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan pelayanan angkutan dan keselamatan perhubungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 dengan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah membandingkannya dengan

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan program kegiatan yang di ajukan dalam Rancangan Awal RKPD dengan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Perhubungan antara pagu Indikatif rancangan awal RKPD dengan kebutuhan dana yang diperlukan untuk rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 telah sesuai.

Proses menyandingkan antara renja dengan RKPD penting dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar ada keselarasan antara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan program kerja yang dilaksanakan oleh tingkat SKPD.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---------------------|---|--------|----------------------|-------------------|-------------------------|---|--------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGA N | | | | 77.460.584.540 | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERHUBUNGA N | | | | 77.971.984.540 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 51.883.706.465 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 51.520.506.465 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 50.000.000 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 50.000.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Perencanaan | 7 Dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Perencanaan | 7 Dokumen | 25.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | 12 Laporan | 25.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan | 25.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 17.663.900.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 17.300.700.000 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 162 Orang/b u | 14.980.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 162 Orang/b u | 14.980.000.000 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 300 Dokumen | 2.683.900.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 300 Dokumen | 2.320.700.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 676.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 676.000.000 |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 318.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket | 318.000.000 |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 170.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang | 170.000.000 |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 76 Orang | 138.000.000 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 76 Orang | 138.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 56 Orang | 50.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | 56 Orang | 50.000.000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 500.000.000 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 25.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 25.000.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 85.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 85.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------|---|---|---|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1200 Paket | 45.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1200 Paket | 45.000.000 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 125.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 125.000.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan | 413 Dokumen | 10.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan | 413 Dokumen | 10.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2500 Laporan | 210.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2500 Laporan | 210.000.000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 7.263.455.575 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 7.263.455.575 |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 Unit | 2.661.378.075 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 Unit | 2.661.378.075 |
| Pengadaan Mebel | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | 100.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 Unit | 100.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 200.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 200.000.000 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 4.000.000.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 4.000.000.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 302.077.500 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 302.077.500 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 25.024.035.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 25.024.035.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|---|---|-------------------|-------------------------|--|---|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.000.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 25.000.000.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 24.035.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 24.035.000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 706.315.890 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 706.315.890 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 77 Unit | 140.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 77 Unit | 140.000.000 |
| Pemeliharaan Mebel | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 50 Unit | 15.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 50 Unit | 15.000.000 |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 3 Unit | 551.315.890 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi | 3 Unit | 551.315.890 |
| PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU | | | | 25.426.878.075 | PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU | | | | 26.301.478.075 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------------|--|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta | | | | | 5.500.000.000 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta | | | | |
| Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Ko ta yang Tersedia | 150 Unit | 1.700.000.000 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kot a | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 150 Unit | 1.700.000.000 | |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 800 Unit | 3.800.000.000 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 800 Unit | 3.800.000.000 | |
| Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | 11.435.100.000 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kab. Garut Samarang Samarang | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | 80.000.000 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Kab. Garut Samarang Samarang | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | 1 Dokumen | 80.000.000 |
| Pembangunan Gedung Terminal | Kab. Garut Cibatu Cibatu Kab. Garut Bl. Limbangan Limbangan Tengah | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | 2 Unit | 8.355.100.000 | Pembangunan Gedung Terminal | Kab. Garut Cibatu Cibatu Kab. Garut Bl. Limbangan Limbangan Tengah | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | 2 Unit | 8.355.100.000 |
| Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 1 Unit | 3.000.000.000 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 1 Unit | 3.000.000.000 |
| Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan | | | | 100.000.000 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan | | | | 100.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Fasilitas Parkir | | | | | Fasilitas Parkir | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 100.000.000 |
| Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 4.843.778.075 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 4.843.778.075 |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang | 3 Unit | 4.218.778.075 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 3 Unit | 4.218.778.075 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|---|--|-------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | Tersedia | | | | | | | |
| Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 Dokumen | 375.000.000 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 12 Dokumen | 375.000.000 |
| Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 12 Laporan | 50.000.000 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | 12 Laporan | 50.000.000 |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan | 8 Unit | 200.000.000 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun g | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang | 8 Unit | 200.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Bermotor | | Bermotor yang Terpelihara | | | Bermotor | | Terpelihara | | |
| Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 2.593.000.000 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 2.593.000.000 |
| Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 1.057.000.000 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 1.057.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|--|--|-------------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 101 Unit | 1.115.000.000 | Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 101 Unit | 1.115.000.000 |
| Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Garut Kota Kota Kulon | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 296.000.000 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Garut Kota Kota Kulon | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 296.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|--|--|---|-------------------|-------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 125.000.000 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 125.000.000 |
| Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | 320.000.000 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | 1.194.600.000 |
| Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Orang | 220.000.000 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 27 Orang | 583.200.000 |
| Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi | 12 Laporan | 100.000.000 | Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi | 12 Laporan | 611.400.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--------|---|-------------------|-------------------------|---|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | |
| Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 345.000.000 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 345.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 345.000.000 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan | 345.000.000 |
| Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko | | | | 120.000.000 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko | | | | 120.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| ta | | | | | ta | | | | |
| Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 120.000.000 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 120.000.000 |
| Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah | | | | 170.000.000 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah | | | | 170.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| Kabupaten/Kota | | | | | Kabupaten/Kota | | | | |
| Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 170.000.000 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 170.000.000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | 150.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | 150.000.000 |
| Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi | | | | 150.000.000 | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi | | | | 150.000.000 |

| Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) |
| pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Ko ta | | | | | Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Ko ta | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 150.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 150.000.000 |
| | | | | 77.460.584.540 | | | | | 77.971.984.540 |

Dari tabel tersebut diatas, Ada perbedaan atau selisih antara Rancangan awal RKPD. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pagu pada sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada awal perencanaan (Ranwal RKPD) sebesar Rp. 2.683.900.000 dan setelah di analisis menjadi Rp. 2.320.700.000. hal ini disebabkan karena untuk honorarium PJJ pengelolaannya di serahkan ke bidang Keselamatan lalu lintas, perkeretaapian dan pelayaran sebagai bidang yang membawahnya;
2. Pagu Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ pada awal perencanaan (Ranwal RKPD) sebesar Rp. 220.000.000 menjadi Rp. 583.200.000. hal disebabkan karena ada penambahan pagu untuk honorarium PJJ sebagaimana dijelaskan pada point 1.
3. Pagu Pelaksanaan Inspeksi Audit & Pemantauan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi pada awal perencanaan (Ranwal RKPD) sebesar Rp. 100.000.0000 menjadi 611.400.000. hal ini disebabkan karena setelah dianalisis ada kebutuhan yang sangat penting terkait pengadaan pos jaga PJJ di sepanjang jalur kereta api Garut – Cibatu, sehingga dipandang perlu untuk dianggarkan pada tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan musrenbang Kabupaten ada beberapa kegiatan yang diusulkan untuk bahan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan yang diusulkan tersebut yang mana merupakan bagian dari tufoksi serta wewenang Dinas Perhubungan selaku SKPD yang menerima usulan.

Menanggapi usulan tersebut, dinas perhubungan melakukan penyaringan dan memvalidasi usulan agar program kegiatan yang di usulkan sesuai dengan sasaran serta tufoksi Dinas Perhubungan.

Adapun program kegiatan yang diusulkan melalui kegiatan musrenbang tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | Indikat or Kinerja | BESARAN/ VOLUME | CAT. |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota | Sukaratu, Malangbong | Jumlah PJU yang terbangun | 5 Unit | diteruskan |
| 2 | | Sukaratu Malangbong | | 5 Unit | diteruskan |
| 3 | | Karyasari Cibalong | | 5 Unit | diteruskan |
| 4 | | Lembang Leks | | 5 Unit | diteruskan |
| 5 | | Sindangsari Cisompet | | 5 Unit | diteruskan |
| 6 | | Sindangsari Cisompet | | 5 Unit | diteruskan |
| 7 | | Sindangsari Cisompet | | 5 Unit | diteruskan |
| 8 | | Baru Dua Malangbong | | 5 Unit | diteruskan |
| 9 | | Godog Karangpawitan | | 5 Unit | diteruskan |
| 10 | | Cibatu Cibatu | | 5 Unit | diteruskan |
| 11 | | Cigarong Cibalong | | 5 Unit | diteruskan |
| 12 | | Sukasono Sukawening | | 5 Unit | diteruskan |
| 13 | | Hegarsari Kadungora | | 5 Unit | diteruskan |
| 14 | | Caringin Karangtengah | | 5 Unit | diteruskan |
| 15 | | Kersamenak Tarogong Kidul | | 10 unit | diteruskan |
| 16 | | Jatisari Karangpawitan | | 5 Unit | diteruskan |
| 17 | | Linggarjati Pamulihan | | 10 unit | diteruskan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | Indikator Kinerja | BESARAN/ VOLUME | CAT. |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| 18 | | PatarumanTarogong Kidul | | 5 Unit | diteruskan |
| 19 | | KarangtengahKadungora | | 5 Unit | diteruskan |
| 20 | | SukasonoSukawening | | 5 Unit | diteruskan |
| 21 | | CintakaryaSamarang | | 5 Unit | diteruskan |
| 22 | | BungbulangBungbulang | | 5 Unit | diteruskan |
| 23 | | DawungsariCilawu | | 5 Unit | diteruskan |
| 24 | | DayeuhmanggungCilawu | | 5 Unit | diteruskan |
| 25 | | HegarmanahBungbulang | | 5 Unit | diteruskan |
| 26 | | CikarangCisewu | | 5 Unit | diteruskan |
| 27 | | CikarangCisewu | | 5 Unit | diteruskan |
| 28 | | CiburialLeles | | 5 Unit | diteruskan |
| 29 | | SukarajaBanuyuresmi | | 5 Unit | diteruskan |
| 30 | | AwassagaraCikelet | | 5 Unit | diteruskan |
| 31 | | LelesLeles | | 5 Unit | diteruskan |
| 32 | | JayabayaMekarmukti | | 5 Unit | diteruskan |
| 33 | | Sir nabaktiPameungpeuk | | 5 Unit | diteruskan |
| 34 | | CilampuyangMalangbong | | 5 Unit | diteruskan |
| 35 | | CibodasCikajang | | 5 Unit | diteruskan |
| 36 | | PasirkiamisPasirwangi | | 5 Unit | diteruskan |
| 37 | | SukaratuBanuyuresmi | | 5 Unit | diteruskan |
| 38 | | MekarmuktiCilawu | | 5 Unit | diteruskan |
| 39 | | SukahatiCilawu | | 5 Unit | diteruskan |
| 40 | | KaryamuktiCibatu | | 5 Unit | diteruskan |
| 41 | | KramatwangiCikajang | | 5 Unit | diteruskan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | LOKASI | Indikat or Kinerja | BESARAN/ VOLUME | CAT. |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| 42 | | SukanagaraCisompet | | 5 Unit | diteruskan |
| 43 | | DepokCisompet | | 5 Unit | diteruskan |
| 44 | | KarangsariKarangpawitan | | 5 Unit | diteruskan |
| 45 | | PadasukaPasirwangi | | 5 Unit | diteruskan |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa prioritas pembangunan Nasional yang ditetapkan pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 bahwa fokus pembangunan dititik beratkan terhadap peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Dengan kebijakan mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Kebijakan sebagaimana tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan dengan menyiapkan kebijakan yang difokuskan untuk pembangunan pada proyek-proyek yang sedang berjalan (pemenuhan target RPJMN, *Major Project*, dan Direktif seperti: PSN, Perpres, dan Kegiatan Prioritas).

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan Nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Garut memprioritaskan pembangunan berkaitan dengan reaktivasi jalur kereta api di wilayah Kabupaten Garut walaupun sampai dengan saat ini kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian Perhubungan dalam hal ini pemerintah pusat. Andil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut sendiri hanya berfokus terhadap penyediaan sarana prasarana keselamatan di sepanjang lintasan kereta api.

Berdasarkan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, mneyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dalam hal ini RPJP nasional, RPJM nasional, renja pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten disusun secara paralel atau ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keselarsan antara RPJMN, RPJM provinsi dan RPJMD Kabupaten Garut harus menjadi landasan serta referensi bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja tahunan SKPD.

Untuk Tahun anggaran 2023 Dinas Perhubungan dalam konteks urusan perhubungan tidak masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Berdasarkan rumusan isu strategis pada bab II, yaitu dengan belum meratanya pemenuhan kebutuhan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi, Belum optimalnya pengelolaan sistem angkutan umum yang terpadu dan berkelanjutan serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan IPTEK dalam penyelenggaraan Transportasi serta masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan keselamatan lalu lintas. Selain itu untuk menjaga keselarsan antara dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan implementasi atas sasaran target kinerja Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2019-2024 untuk mendukung capaian Misi 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 .

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah : *“Meningkatnya Penyediaan Infrastuktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas;*

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah :

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- 2) Meningkatkan pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | Satuan | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN |
|----|---|--|--|--------|--------------------------------|
| | | | | | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas | | Tingkat ketersediaan sarana prasarana perhubungan, fasilitas perlengkapan jalan, angkutan umum yang beroperasi, penyuluhan keselamatan lalulintas dan angkutan dan laik layar sarana pelayaran | % | 87,63 |
| | | Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Trasportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan | % | 90,69 |
| | | | Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan | % | 85,99 |
| | | Meningkatnya pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran | Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi | % | 81,96 |
| | | | Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan | % | 85,07 |
| | | | Tingkat laik layar sarana pelayaran | % | 94,44 |

3.2.1 Program dan Kegiatan

Dalam Perubahan RPJMD Kab. Garut tahun 2019-2024 dinas perhubungan termasuk kedalam misi 3 yaitu Mewujudkan

pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Apabila dikaitkan dengan aspek pelayanan umum urusan perhubungan (IKK urusan perhubungan) penyediaan sarana prasarana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja IKK urusan perhubungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah, Dinas perhubungan dalam menetapkan program kegiatannya berusaha untuk menyelaraskannya dengan RPJMD Perubahan serta Renstra Perubahan dimana fokus pembangunan berada pada penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai, karena di beberapa wilayah kerja Dinas Perhubungan masih banyak fasilitas serta sarana prasarana yang belum memadai bahkan ada beberapa wilayah yang masih kurang sarana prasarana penunjang operasionalnya.

Adapun faktor utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan program/ kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah sebagai upaya dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah seperti :

- a. Pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang melalui peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian dengan menyediakan infrastruktur dasar perhubungan dan pelayanan perhubungan yang merata dan berkualitas;
- b. Untuk pencapaian SDGs, Dinas Perhubungan berperan secara tidak langsung dalam 17 tujuan SDGs seperti dalam penanganan perubahan iklim dimana Dinas Perhubungan memiliki pelayanan yang berkaitan dengan uji emisi kendaraan bermotor;

- c. Untuk pengentasan kemiskinan Dinas Perhubungan berupaya menyediakan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas transportasi ke wilayah terpencil;
- d. Dalam pendayagunaan potensi ekonomi daerah Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan penyediaan sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor, potensi parkir dan terminal dll.

Adapun program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 meliputi tiga program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Indikator Program :

- 1) Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan;
 - 2) Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas;
 - 3) Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU);
 - 4) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum;
 - 5) persentase sosialisasi keselamatan perhubungan.
3. Program Pegelolaan Pelayanan;

Indikator Program :

- 1) Persentase sarana pelayanan yang laik layar.

Berdasarkan pagu validasi Renja 2023 yang telah di *input* ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara keseluruhan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 77.971.984.540,- yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kabupaten Garut T.A 2023.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rencana kerja Dinas Perhubungan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan serta peningkatan pelayanan angkutan umum berikut sosialisasi keselamatan perhubungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sektor Transportasi saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan berkembangnya pusat – pusat perekonomian di Kabupaten Garut akan tetapi hal tersebut belum diimbangi dengan keberadaan sarana prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai. Disamping itu ada hal penting pula yaitu sebagai penyelarasan dengan dokumen – dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.

Rencana kerja Dinas Perhubungan disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 merupakan implementasi atas Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan tersebut diatas mengisaratkan bahwa seluruh program kegiatan/ sub kegiatan di input ke aplikasi berbasis elektronik yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang prosesnya melewati beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan
2. Rancangan Awal
3. Rancangan
4. Musrenbang
5. Rancangan Akhir

6. Penetapan.

Dari segi pendanaan anggaran program kegiatan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2023 berasal dari APBD Kabupaten Garut.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|---|--|---|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | 77.971.984.540 | | | | 78.829.313.075 | | |
| 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 51.520.506.465 | | | | 50.760.935.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 | | |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyusunan Dokumen penganggaran evaluasi kinerja | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 7 Dokumen 7 Dokumen | 12 Laporan | 25.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 25.000.000 |
| 2 | 15 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan penyusunan Dokumen penganggaran evaluasi kinerja | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 25.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|---|---|-----|---|--|---|--|---|---|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|-----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 17.300.700.000 | | | 17.663.900.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji tunjangan jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng | 100 % | 162 Orang/b u | 144n31 orang | 14.980.000.000 | Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | | 14.980.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang menerima gaji tunjangan jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng | 100 % | 2 Dokumen | 431 orang | 2.320.700.000 | Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | | 2.683.900.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 676.000.000 | | | 713.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng | 100 % | 3 Paket | 431 orang | 318.000.000 | Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | | 350.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 10 Orang | 431 orang | 170.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 170.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 300 Orang | 431 orang | 138.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 138.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kab. Garut yang dibina | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 75 Orang | 431 orang | 50.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 55.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 500.000.000 | | | | 515.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 20 Paket | 12 Laporan | 25.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 25.000.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------|---|---|-----|---|--|---|---|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | 100 % | 1 Paket | 12 Laporan | 85.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 100.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | 100 % | 1200 Paket | 12 Laporan | 45.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 45.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | 100 % | 2 Paket | 12 Laporan | 125.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 125.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggung | 100 % | 1 Dokumen | 12 Laporan | 10.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 10.000.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 2 Laporan | 12 Laporan | 210.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 210.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 7.263.455.575 | | 6.340.000.000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 35 Unit | 78 unit | 2.661.378.075 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 1.140.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Mebel | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 150 Unit | 78 unit | 100.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 100.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 18 Unit | 78 unit | 200.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 250.000.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|----------|--|---|---|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 1 Unit | 78 unit | 4.000.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 4.500.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 109 Unit | 78 unit | 302.077.500 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 350.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 25.024.035.000 | | | | 25.024.035.000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 12 Laporan | 24 Laporan | 25.000.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 25.000.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 100 % | 12 Laporan | 24 Laporan | 24.035.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 24.035.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | |
|------|---|---|-----|---|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 455.000.000 | | | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun | 100 % | 79 Unit | 130 Unit | 140.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 140.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 5 | Pemeliharaan Mebel | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun | 100 % | 50 Unit | 130 Unit | 15.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 15.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggun | 100 % | 1 Unit | 130 Unit | 551.315.890 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub | 100 % | 300.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | | | 5 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | | | | | | | | | | | 27.918.378.075 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | 5 | 2 | 2 | | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 5.800.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.301.478.075 | | | | 27.918.378.075 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.500.000.000 | | | | 5.800.000.000 |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|----------|--|--|--|--|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng | 854,00 % | 150 Unit | 950 Unit | 1.700.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 854,00 % | 1.800.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan | Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu ng | 854,00 % | 800 Unit | 950 Unit | 3.800.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 854,00 % | 4.000.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | | | | | | | | 11.435.100.000 | | | 12.588.000.000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun | Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C | Kab. Garut Samarang Samarang | 9069,00 % | 1 Dokumen | 12 Laporan | 80.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 88.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pembangunan Gedung Terminal | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun | Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C | Kab. Garut Cibatu Kab. Garut Bl. Limbangan Limbangan Tengah | 9069,00 % | 2 Unit | 12 Laporan | 8.355.100.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 9.000.000.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|--|--|---|---|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | Jumlah Laporan pengelolaan terminal penumpang type C | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung Kab. Garut Bayongbong Mulyasari | 9069,00 % | 1 Unit | 12 Laporan | 3.000.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 3.500.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | | | | | | | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Kab. Garut Garut Kota Semua Kelurahan | 9069,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 100.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | 4.843.778.075 | | 4.898.778.075 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 9069,00 % | 3 Unit | 12 Laporan | 4.218.778.075 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 4.218.778.075 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 9069,00 % | 12 Dokumen | 12 Laporan | 375.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 375.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji | Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 9069,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 55.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 9069,00 % | 8 Unit | 12 Laporan | 200.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan | 9069,00 % | 250.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | 2.593.000.000 | | | | 2.682.000.000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 8658,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.057.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | 8658,00 % | 1.057.000.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu | 8658,00 % | 101 Unit | 12 Laporan | 1.115.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | 8658,00 % | 1.200.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten | Kab. Garut Garut Kota Kulon | 8658,00 % | 1 Dokumen | 12 Laporan | 296.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | 8658,00 % | 300.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu | 8658,00 % | 4 Laporan | 12 Laporan | 125.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas | 8658,00 % | 125.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | | | | | | | 1.194.600.000 | | | | 1.194.600.000 | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ | Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan | Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpanggu | 8507,00 % | 27 Orang | 12 Laporan | 583.200.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan | 8507,00 % | 583.200.000 | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|---|--|--|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|--|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan | Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 8507,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 611.400.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan | 8507,00 % | 611.400.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 345.000.000 | | | 350.000.000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyediaan angkutan umum orang dan barang | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 8196,00 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 345.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum | 8196,00 % | 350.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.1 | | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 120.000.000 | | | 125.000.000 | | | |
| 2 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 8196,00 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum | 8196,00 % | 125.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.1 | | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 170.000.000 | | | 180.000.000 | | | |

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 | 1 | 0 | 2.1 | 0 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan | Kab. Garut Tarogong Kidul Haurpangung | 8196,00 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 170.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum | 8196,00 % | 180.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | | | | | | | | | | | 150.000.000 | |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | | Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | 150.000.000 |
| 2 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase laik layar sarana pelayaran | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut | Kab. Garut Pameungpeuk Pameungpeuk | 9444,00 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000 | Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum | Persentase laik layar sarana pelayaran | 9444,00 % | 150.000.000 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | | | 77.971.984.540 | | | | | 78.829.313.075 |

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kebutuhan maka Dinas Perhubungan mengambil kebijakan :

- a. menunda kegiatan yang tidak terlalu mendesak untuk direncanakan kembali pada tahun selanjutnya;
- b. berupaya mengajukan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi serta pusat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang sangat penting seperti pembangunan terminal type C;
- c. berinovasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini disusun melalui tahapan serta proses yang terukur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik dalam proses penyusunannya maupun dalam proses memasukan data di Aplikasi SIPD sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023.

Sebagai tindak lanjut atas Renja Tahun 2023 agar berjalan sesuai dengan rencana maka kebijakan yang diambil adalah :

- a. mengintegrasikan RKA 2023 ke Aplikasi SIRUP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. menyusun rencana kinerja dan Rencana aksi Tahun Anggaran 2023;
- c. menyusun penetapan surat keputusan pengguna anggaran untuk pengelola kegiatan TA 2023.

Akhirnya semoga perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat berhasil dan berdaya guna serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN